

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Dan juga negara yang belum terlepas dari masalah yang dimiliki, termasuk dalam bidang perekonomian. Salah satu permasalahan yang kini masih kerap dihadapi dalam kalangan masyarakat Indonesia sendiri ialah permasalahan kemiskinan. Kemiskinan ialah sebuah permasalahan yang memiliki sifat multidimensi dan multisektor dengan bermacam karakteristiknya, dimana kondisi tersebut harus cepat diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan dalam pembangunan manusia. Oleh sebab itu, penanggulangannya harus secara bersinergi dari pemerintah beserta masyarakat dan juga dunia usaha.

Dilihat dari sudut pandang hukum yang ada di Indonesia, pada pembukaan UUD 1945 memuat pada azas Pancasila yang mana merupakan suatu dasar falsafah negara Indonesia yang melahirkan citra dasar hukum yang dimiliki sesuai dari jiwa persatuan rakyat Indonesia. Untuk menciptakan situasi seperti keadilan sosial yang dimuat dalam dasar hukum Indonesia, maka pemerintah haruslah melakukan tindakan yang sesuai dalam dasar hukum itu sendiri, seperti halnya yang tertuang dalam UUD 1945 pada alinea ke 4.

UUD 1945 pasal 27 ayat 2, pasal 28 huruf H ayat 3, pasal 34 ayat 1 dan 2 dijelaskan juga tentang kesejahteraan sosial berhak didapatkan oleh warga negara Indonesia.

Dilihat dari sajian diatas memberikan sebuah arti yang mendalam bahwa kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya berhak diperoleh oleh warga negara Indonesia dan adanya keterlibatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang bertujuan melindungi kehidupan bangsa Indonesia serta adanya usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam arti kata lain, sistem kesejahteraan sosial nasional berdasarkan atas asas Pancasila yang dilandaskan dengan UUD 1945.

Bumi, dan sumber daya alam yang dimiliki, didalamnya merupakan hak milik dari sebuah negara itu sendiri. Dipergunakan untuk kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyatnya. Namun sadar atau tidaknya penyaluran dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia itu dirasa

kurang merata bagi rakyat Indonesia. Contohnya saja dalam permasalahan ekonomi yang mana harga minyak bumi dan bahan bakar menaik kemudian mengimbas pada kenaikan harga bahan pokok yang menjadikan keadaan jadi sulit bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Penyebab kurang merata disini dilihat dari adanya hubungan yang membentuk kehidupan sosial tersebut, baik antara masing-masing negara berkembang, antara berbagai lapisan sosial masyarakat, dan juga antara pusat dan daerah. Hal ini mengakibatkan antara si kaya dan si miskin semakin jauh jarak pemisah diantara mereka, fenomena inilah yang disebut sebagai “*Entwicklung der Unterentwicklung*” (perkembangan negatif).

Dalam konteks pembangunan ekonomi di suatu daerah, IPM merupakan salah satu bagian utama yang dicantumkan pada pola dasar pembangunan daerah. Hal ini memberitahukan IPM dan indikator-indikator yang membentuk variabel IPM akan menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan dan pembangunan yang terarah. Indeks pembangunan manusia merupakan ukuran pembangunan pada suatu wilayah, yang mana seharusnya IPM memiliki hubungan (-) terhadap kemiskinan, karena saat suatu wilayah memiliki IPM tinggi, maka tingkat kemiskinan masyarakat yang dimiliki pun seharusnya rendah. Kondisi inilah yang sangat diharapkan guna menjadi negara yang maju untuk kedepannya.

Badan Pusat Statistik(BPS) Indonesia telah merilis tentang tingkat kemiskinan. Lebih jelasnya dari data yang telah disajikan, tingkat kemiskinan Indonesia dari tahun 2010 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Untuk tahun 2010 sendiri memiliki nilai sebesar 13,33 persen. Diikuti tahun 2011 adanya penurunan dibandingkan tahun 2010, memiliki nilai yaitu 12,49 persen. Tahun 2012 adanya penurunan lagi dibandingkan tahun 2011, memiliki nilai yaitu 11,81. Tahun 2013 adanya penurunan dibandingkan dengan tahun 2012, memiliki nilai yaitu 11,42 persen. Tahun 2014 adanya penurunan dibandingkan dengan tahun 2013, memiliki nilai yaitu 11,11 persen. Pada tahun 2015 adanya penurunan dibandingkan dengan tahun 2014, memiliki nilai yaitu 11,18 persen. Kemudian pada tahun 2016 adanya penurunan dibandingkan dengan tahun 2015, memiliki nilai yaitu 10,78 persen. Tahun 2017 adanya penurunan dibandingkan dengan tahun 2016, memiliki nilai yaitu 10,38 persen. Tahun 2018 adanya penurunan dibandingkan dengan tahun 2017, memiliki nilai yaitu 9,74 persen. Dan terakhir tahun 2019, adanya penurunan dibandingkan dengan tahun 2018, memiliki nilai yaitu 9,32 persen.

Upaya mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang yang dilakukan salah satunya adalah peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia(SDM) penduduk miskin. Untuk itu penting bagi kita melihat perkembangan SDM yang diukur dengan IPM. Berdasarkan dari data badan pusat statistik (BPS) yang diperoleh, bahwa persentase IPM di Indonesia telah mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai 2019. Untuk tahun 2010 memiliki rentan nilai sebesar 66,53 persen. Diikuti dengan tahun 2011 mengalami kenaikan, dimana nilai di tahun 2011 yaitu 67,09 persen. Tahun 2012 mengalami kenaikan juga, dimana nilai di tahun 2012 yaitu 67,7 persen. Tahun 2013 mengalami kenaikan juga dari tahun sebelumnya, dimana nilai pada tahun ini sebesar 68,31 persen. Pada 2014 telah adanya kenaikan juga dari tahun 2013, memiliki nilai yaitu 68,9 persen. Tahun 2015 mengalami kenaikan juga dari tahun sebelumnya, dimana nilai pada tahun ini sebesar 69,55 persen. Tahun 2016 mengalami kenaikan juga dari tahun sebelumnya, dimana nilai yang diperoleh dari tahun ini sebesar 70,18 persen. Tahun 2017 mengalami kenaikan lagi, dimana nilai di tahun 2017 yaitu 70,81 persen. Tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana nilai pada tahun sebelumnya sebesar 71,39 persen. Dan terakhir di tahun 2019, mengalami kenaikan, dimana nilai yang diperoleh sebesar 71,92 persen.

IPM dan tingkat kemiskinan seharusnya menjadi indikator yang sangat berarti dan baik dari tahun-tahun berikutnya. Namun, dilihat pada data yang ada di Indonesia bahwa indeks pembangunan manusia sudah tergolong baik kemajuannya dan untuk tingkat kemiskinannya masih mengalami fluktuasi di tahun 2015.

Terlihat bahwa sisi penyebab dari kemiskinan sendiri dapat dibagi menjadi tiga bagian: pertama kemiskinan struktural dimana seseorang itu memiliki sumber mata pencaharian yang terbatas, kedua kemiskinan kultural yaitu taraf hidup dari seseorang miskin yang sudah turun temurun namun masih bisa diperbaiki, dan ketiga kemiskinan temporal yaitu orang miskin yang disebabkan oleh keadaan yang bersifat sementara seperti hal adanya bencana alam. Adapun persoalan yang terlihat di Indonesia adalah apakah kenaikan indeks pembangunan manusia(IPM) tidak diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan atau malah sebaliknya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin melihat sejauh mana IPM mempengaruhi tingkat kemiskinan dari 40 jurnal yang ditemukan. Maka, penulis dapat menarik kesimpulan

yang diberi judul dengan **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. (Ditinjau Dari Studi Literatur).**

1.2 Rumusan Masalah

Dimana permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan indeks pembangunan manusia(IPM) dan tingkat kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia(IPM) terhadap tingkat kemiskinan berdasarkan referensi yang terpilih?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat dari permasalahan yang disajikan pada bagian atas, maka tujuan yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perkembangan indeks pembangunan manusia(IPM) dan tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia(IPM) terhadap tingkat kemiskinan berdasarkan referensi yang terpilih.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan pada penelitian ini agar memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat sekitar, baik dilihat dari sisi pemerintah maupun sisi masyarakat Indonesia serta sisi para akademis, dimana manfaat nya adalah:

1. Sisi pemerintahan: bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dalam kebijakan yang baik, serta pembentukan program-program yang mengarah pada pengentasan tali kemiskinan yang ada.
2. Sisi masyarakat: bisa digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan yang dimiliki, guna menjadi masyarakat yang memiliki manfaat yang banyak untuk yang lainnya, dan tidak lepas untuk mengatasi kemiskinan.
3. Sisi Akademis: bisa digunakan untuk memberikan informasi yang ada sekaligus menambah wawasan ilmu dalam mengatasi masalah kemiskinan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dimana penelitian ini dilakukan dengan melihat jurnal yang melakukan penelitian di Indonesia, yang ditinjau dengan analisis statistika deskriptif sebanyak 40 jurnal yang terpublikasi yang terkait dengan indeks pembangunan manusia(IPM) dan tingkat kemiskinan, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Dimana penelitian ini juga terfokus secara spesifik terhadap variabel indeks pembangunan manusia(IPM) dan tingkat kemiskinan.

1.6 Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan yang akan menjelaskan sub tema dalam permasalahan yang berhubungan pada judul penelitian, yaitu:

- **BAB I Pendahuluan**
Di bab I menjelaskan tentang latar belakang dalam penelitian, memecahkan rumusan masalah yang ada, menjelaskan tujuan dari penelitian, mengemukakan manfaat dari penelitian, dan ruang lingkup serta sistematika penjelasan yang dilakukan dalam penelitian ini.
- **BAB II Tinjauan Pustaka**
Di bab II ini menerangkan pengertian, ukuran, perhitungan, bentuk, ciri-ciri, faktor, indikator, serta kebijakan yang terkait antara kedua variabel.
- **BAB III Metodologi Penelitian**
Di bab III ini bersikan tentang metodologi review untuk penelitian.
- **BAB IV Hasil dan Pembahasan**
Membahas pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan, yang dilihat dari periode pembahasan, area studi dan area publikasi terbanyak dan hasil dari penelitian jurnal yang terpilih.
- **BAB V Penutup**
Memberikan kesimpulan dan juga saran yang membangun untuk mengatasi permasalahan.